PARADIGMA PERKONOMIAN INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN ROFORMMASI

Ahmad Shodiq ¹, Farihana Lutfiatul Maula ²

¹Lecturer In Syaria Economics, Faculty Of Islamic Econommices And Bussines, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Email : ahmadsodiq@uinsatu.ac.id

²Student Of Syaria Economics, Faculty Of Islamic Econommices And Bussines, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Email : farihanalutfiatul@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the paradigm shifts in the Indonesian economy from the Old Order, the New Order, to the Reformation, as well as the factors influencing this development. The study employs a literature review method by gathering secondary data from scientific journals, academic books, and relevant research reports. The findings indicate that during the Old Order period (1945-1966), state-controlled economic policies and the nationalization of foreign companies led to high inflation and economic instability. In the New Order period (1966-1998), the government implemented a more liberal economic model by encouraging foreign investment and economic growth, resulting in significant growth in the economy and a reduction in poverty, but also causing social inequality and corruption practices. The Reform Era (1998-present) is marked by decentralization, transparency, and broader community participation in economic policy-making, aimed at creating inclusive and equitable growth. This research provides an in-depth understanding of the evolution of Indonesia's economic policy and its impact on economic growth, social stability, and community welfare. These findings are expected to serve as a reference for policymakers in formulating more effective and equitable economic policies in the future.

Keyworwds : Economy, Old Older, New Older, Reformation

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perubahan paradigma perekonomian Indonesia dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Studi ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan data sekunder dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Orde Lama (1945-1966), kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kontrol negara dan nasionalisasi perusahaan asing menyebabkan inflasi tinggi dan ketidakstabilan ekonomi. Pada masa Orde Baru (1966-1998), pemerintah menerapkan model ekonomi yang lebih liberal dengan mendorong investasi asing dan pertumbuhan ekonomi, yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, namun juga menimbulkan ketimpangan sosial dan praktik korupsi. Era Reformasi (1998-sekarang) ditandai dengan desentralisasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan ekonomi, dengan tujuan menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai evolusi kebijakan ekonomi Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan berkeadilan di masa depan.

Kata Kunci : Perekonomian, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi

I. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi politik yang berlaku. Periode Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi merupakan tiga fase penting yang membentuk struktur dan karakter perekonomian nasional. Setiap periode memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola sumber daya ekonomi, yang mencerminkan konteks sosial, politik, dan tantangan global pada masanya. Pada masa Orde Lama (1945-1966), Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun fondasi ekonomi setelah meraih kemerdekaan. Pemerintah berfokus pada industrialisasi dan pembangunan infrastruktur, dengan kontrol yang ketat dari negara. Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk menciptakan stabilitas, sering kali berujung pada inflasi tinggi dan ketidakpastian ekonomi akibat konflik politik dan ketidakpuasan masyarakat.

Dengan jatuhnya Orde Lama, Orde Baru (1966-1998) berusaha untuk memperbaiki keadaan dengan menerapkan model ekonomi yang lebih liberal. Pemerintahan di bawah Soeharto mengedepankan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi yang agresif. Kebijakan ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang substansial dan pengurangan angka kemiskinan, tetapi juga menimbulkan masalah ketimpangan sosial yang signifikan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi masalah yang merusak, menciptakan ketidakpuasan di kalangan rakyat dan akhirnya memicu krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Era Reformasi (1998-sekarang) muncul sebagai respons terhadap krisis tersebut, menandai pergeseran paradigma perekonomian menuju lebih banyak partisipasi masyarakat dan desentralisasi.

Dalam konteks ini, pemerintah berusaha untuk memperbaiki sistem ekonomi dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Dengan mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif, diharapkan perekonomian Indonesia dapat tumbuh lebih stabil dan berkeadilan. Negara harus mengatur penggunaan sumber daya ekonomi untuk didistribusikan secara merata dan adil sehingga tidak ada anggota masyarakat yang dirugikan baik oleh Negara maupun sesama anggota masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut. Dalam menegakkan hukumnya, Islam didasarkan pada dasar keadilan di antara manusia. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl (16) ayat 90:

تذكرون لعظكم الفحشاء والمنكر والبغى عن وينهى القربى وإيتاي عذى والاعحسان لعدل ياءمربا الله إن

Artinya: "Sesungguhnya, Allah memerintahkan (kalian) untuk berlaku adil dan berbuat baik, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, keburukan, dan permusuhan. Allah mengajarkan kepada kalian supaya kalian dapat mengambil pelajaran".

Kebijakan pemerintah seharusnya untuk melindungi yang lemah, pertumbuhan perekonomian yang tinggi akan menciptakan ketidakseimbangan pasar yang sangat mengancam ekonomi jika kondisi tersebut diperparah oleh kerjasama antara penguasa dan pengusaha dalam mengendalikan aset negara (Zuchroh, 2024). Masalah ini adalah bentuk monopoli ekonomi yang berbahaya.

Artikel ini bertujuan untuk Mengkaji perubahan paradigma perekonomian Indonesia dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut, membandingkan kebijakan ekonomi yang diterapkan di masing- masing era dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia di setiap periode serta peluang yang muncul sebagai hasil dari perubahan kebijakan dan struktur ekonomi.

Perubahan paradigma perekonomian Indonesia dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang evolusi perekonomian Indonesia dari masa ke masa, termasuk konteks sejarah yang membentuk kebijakan ekonomi saat ini,serta untuk menyediakan analisis mendalam tentang kebijakan ekonomi yang diterapkan di setiap periode, yang dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

II. METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022). Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui: Jurnal ilmiah yang terindeks di database internasional (misalnya, Scopus, Web of Science) dan nasional (Sinta, Garuda), Buku akademik yang relevan dengan topik penelitian, Laporan penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan oleh lembaga riset atau

universitas. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan kredibilitas, kualitas, dan relevansi dengan topik penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perekonomian Pada Masa Orde Lama

Pada periode 1952-1958, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,9%, tetapi turun drastis menjadi 1,9% pada 1960-1965. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi tahunan pada 1951-1966 hanya 2,7%. Defisit anggaran pemerintah terus meningkat, dan solusi yang diambil adalah dengan mencetak uang baru, menyebabkan inflasi tinggi mencapai 23,5% per tahun (1955-1960). Bahkan pada masa Kabinet Hatta (1949-1950), dilakukan reformasi moneter melalui devaluasi mata uang dan pengurangan jumlah uang beredar (Maret 1950) (Maknun, L. 2024). Pada 1951, pemerintah melakukan nasionalisasi besar-besaran perusahaan asing, terutama milik Belanda, sebagai implementasi UU No. 78/1958 yang bersifat anti-investasi asing. Kebijakan ini didasari kekhawatiran bahwa investasi asing akan menguasai perekonomian Indonesia. Namun, langkah ini justru memperburuk ekonomi, salah satunya dengan penutupan Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada 1958 karena mayoritas perusahaan terdaftar adalah asing, sehingga terjadi pelarian modal besar-besaran (Lindblad, 2008). Terkait Kebijakan Moneter dan Perbankan Pada 1965, pemerintah mendirikan Bank Berjuang sebagai hasil merger bank-bank milik negara, bertujuan untuk mengendalikan sistem perbankan secara terpusat sesuai konsep ekonomi terpimpin. Namun, bank-bank saat itu hanya berfungsi sebagai penyedia dana proyek pemerintah melalui pencetakan uang, terutama untuk proyek-proyek khusus presiden (Sundhaussen, 1982). Neraca ekonomi nasional pada masa Orde Lama sangat buruk, dengan defisit anggaran rata-rata 137% dari pendapatan (1955-1965). Defisit juga terjadi dalam neraca perdagangan dan pembayaran, di mana impor lebih besar daripada ekspor. Untuk menutup defisit, Indonesia mengandalkan pinjaman luar negeri, terutama dari Blok Komunis (59%), Blok Barat (25%), Asia-Afrika (11,2%), dan IMF (4,3%), mencerminkan orientasi politik dan ekonomi yang condong ke Blok Timur pada masa itu (Glassburner, 1971).

Pada masa orde lama, perekonomian Indonesia masih sangatlah buruk. Hal tersebut dikarenakan negara Indonesia masih belum lepas dari jajahan Belanda. walaupun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, akan tetapi peperangan antara Belanda dan Indonesia masih terjadi di tahun 1940-an (Fahriska & Zulkifli, n.d.). Masa orde lama terjadi pada tahun 1945-1968 pada saat itu merupakan masa pemerintahan Ir. Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia sekaligus tokoh

pejuang kemerdekaan. Pada masa orde lama, Negara Indonesia menganut sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Soekarno juga menerapkan beberapa kebijakan perekonomian yang terdiri dari: a) De Javasche Bank milik Belanda dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia, b) Usaha yang bersangkutan dengan martabat orang banyak diamankan, c) Berupaya untuk menghilangkan kontrol Belanda dalam kegiatan perdagangan ekspor-impor, d) Dan kebijakan lainnya yang dibuat agar perekonomian Indonesia mengalami kemajuan.

Meskipun Soekarno telah mengeluarkan beberapa kebijakan akan tetapi kebijakan tersebut tidak berjalan semestinya dikarenakan beberapa penyebab, seperti keadaan politik yang propaganda dan sabotase, kabinet Soekarno mengalami jatuh bangun sehingga tidak mampu, melakukan kebijakan sebaik mungkin dikarenakan adanya pertarungan antar politik, basis borjuis yang lemah, sedangkan dianggap mampu menjadi kekuatan dalam perekonomian dan dianggap mampu mendorong industrialisasi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia saat kesulitan ekonomi pada masa orde lama adalah pada bulan Juli tahun 1946, Menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP melakukan program pinjaman nasional berusaha untuk menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan Singapura dan Malaysia dalam memperoleh kesepakatan untuk mengatasi masalah ekonomi pada saat itu dan dilakukan Konferensi Ekonomi pada Februari tahun 1946. (Inana, 2023) Adapun beberapa capaian prestasi yang didapatkan pada masa orde lama yaitu:

- a) Pertumbuhan ekonomi diatas 6 %
- b) Nasionalisasi Perusahaan privasi yang ditingkatkan Belanda
- c) Didirikan bank yang merupakan undang-undang dasar
- d) Angkatan kerja 72% Angkatan kerja pertanian
- e) Neraca perdagangan

Perekonomian Pada Masa Orde Baru

Perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Baru, yang mencakup periode dari tahun 1966 hingga 1998, dimulai setelah Presiden Soekarno digantikan oleh Jenderal Soeharto dalam peristiwa "Gerakan 30 September" atau G30S/PKI pada tahun 1965. Pada awal masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami kondisi ekonomi yang sulit akibat inflasi tinggi, ketidakstabilan politik, dan ketegangan antara etnis dan agama. Dengan keluarnya SUPERSEMAR pada 11 Maret 1966, yang menandai awal Orde Baru, Soeharto mulai menerapkan kebijakan yang berbeda dari pendahulunya. Pergantian pemerintahan ini

memiliki dinamika politik yang berbeda, dengan Soeharto lebih menekankan pada ketahanan nasional sebagai respons terhadap krisis ekonomi dan berbagai pemberontakan yang melanda Indonesia selama masa Orde Lama.(Setia, 2023)

Pembangunan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto dilakukan dengan fokus pada stabilitas politik domestik, pertahanan, dan keamanan. Mengembangkan hubungan dengan negara-negara Barat memungkinkan Indonesia untuk menerapkan politik bebas aktif. Negara-negara Barat, termasuk pengusaha, investor asing, dan perbankan, memainkan peran penting dalam membangun ketahanan nasional Indonesia. Dalam hubungan politik internasional ini, Indonesia menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat yang turut membantu dalam pembangunan ketahanan nasional. Hubungan ini semakin baik saat Presiden Soeharto meluncurkan kebijakan baru, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967, yang memungkinkan pengusaha dalam negeri dan asing untuk mendirikan perusahaan di Indonesia. Undang- Undang PMA ini dibuat untuk menggerakkan perekonomian yang berorientasi pada pasar, mengingat perekonomian Indonesia sebelumnya bergantung pada pendapatan ekspor perminyakan. (Shaleha, P; Selviana & Muharman, 2024)

Pada masa orde baru perekonomian terdiri dari 2 macam yaitu perekonomian jangka Pendek dan perekonomian jangka Panjang. Pertama, pada perekonomian jangka pendek terdapat stabilitas dan rehabilitas dimana dengan adanya kebijakan ini stabilitas bertujuan untuk pengendalian inflasi supaya harga tidak melonjak secara terus menerus, sedangkan rehabilitas yang dimaksud ialah rehabilitas fisik terhadap sarana prasaran dan alat produksi yang rusak (Firdaus, Megantara, & Siliwangi, 2022). Kedua, perekonomian jangka Panjang terdiri dari replita I-V, yang mana bertujuan untuk menekan laju inflasi karena kondisi politik pada saat itu yang stabil dan lebih kokoh dari orde lama karena pendapatan negara yang bagus. Adapun penjelasan mengenai replita 1-5 sebagai berikut :

a) Replita I

Repelita I dimulai sejak tanggal 1 April tahun 1969, tujuan dari pelaksanaannya yaitu untuk menaikkan taraf hidup rakyat juga menaruh dasar-dasar pembangunan tahap selanjutnya. Pelaksanaan Repelita I tersebut meletakkan sasaran pada pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat di bidang kerohanian. Sasaran-sasaran pembangunan tersebut dititikberatkan pada pembangunan di bidang pertanian dengan melakukan pembaruan terhadap kegiatan pertanian rakyat. Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi

masyarakat yang pada saat itu masih hidup dengan mengandalkan hasil pertanian. Di dalam pelaksanaan Repelita I ini kehidupan masyarakat mengalami perubahan dari yang semula berpusat pada pertanian tradisional berkembang menuju pertanian modern.

b) Replita II

Program Repelita II diawali pada tanggal 1 April 1974 dengan menjadikan kesuksesan Repelita I sebagai tolak ukur pelaksanaan. Terdapat setidaknya lima cakupan sasaran yang diharapkan terwujud pada Repelita II, diantaranya, terdiri dari: (1) tersedianya bahan pangan dan sandang yang cukup; (2) tersedianya perumahan serta fasilitas lain; (3) meluasnya sarana dan prasarana; (4) meratanya kesejahteraan rakyat; dan (5) meluasnya kesempatan kerja. Dalam rangka mewujudkan kelima sasaran tersebut, pemerintah Orde Baru berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Di mana terdapat peningkatan produksi di berbagai macam sektor, baik sektor pertanian, industri, pertambangan atau pun sektor – sektor lainnya.

c) Replita III

Pelaksanaan program Repelita III secara resmi dimulai pada tanggal 1 April 1979. Pembangunan pada Repelita III menitikberatkan pada segi pemerataan dengan berlandaskan trilogi pembangunan. Di mana kemudian terdapat 8 jalur pemerataan, yaitu: (1) Pemerataan guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat; (2) Pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) Pemerataan pendapatan; (4) Pemerataan kesempatan kerja; (5) Pemerataan kesempatan berusaha; (6) Pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan; (7) Pemerataan pembangunan; dan (8) Pemerataan keadilan. Pemerintah banyak menerapkan berbagai program terkait dengan masing – masing jalur pemerataan.

d) Replita IV

Repelita IV diawali pada tanggal 1 April tahun 1984, kemudian berakhir pada 31 Maret tahun 1989. Pelaksanaan dari Repelita IV terfokus pada pengembangan industri, terutama industri padat karya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menaikkan devisa negara, serta prioritas industri karena menaikkan nilai tambah dalam sumber daya domestik. Pemerintah mengubah prioritas yang semula berfokus pada sektor pertanian menjadi industri berkaitan dengan pada tahun 1984 swasembada beras Indonesia hampir mencapai angka 100 persen. Akan tetapi kebijakan prioritas tersebut belum secara konsisten diterapkan di Indonesia.

e) Replita V

Program Repelita V dimulai oleh pemerintah pada 1 April tahun 1989. Melanjutkan Repelita-repelita sebelumnya, pelaksanaan Repelita V difokuskan pada diversifikasi ekonomi dalam rangka mengurangi ketergantungan akan minyak serta gas bumi dengan cara mengembangkan industri ekspor. Dapat dikatakan dalam pelaksanaan Repelita V, pemerintah tetap mengalokasikan program di sektor pertanian sama seperti tahapan sebelumnya. Di mana pertanian sendiri masih masuk dalam kategori sektor unggulan Indonesia pada masa itu. Diiringi dengan pertumbuhan di bidang ekspor non-migas dan perkembangan dalam sektor industri yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa itu. (Rahmawati, 2022)

Perekonomian Indonesia Pada Masa Reformasi

Kondisi politik di Indonesia pada masa Presiden Soekarno belum stabil, sehingga mempengaruhi perkembangan perekonomian nasional. Hal ini bisa terjadi dikarenakan akibat dari masih banyak terjadinya gejolak politik di dalam negeri selama periode 1950-an hingga pertengahan 1965. Kondisi tersebut, mengakibatkan kebijakan moneter yang diterapkan menjadi tidak efektif, terutama ketika Pemerintah mengeluarkan kebijakan membiayai perang dengan mencetak uang. Keadaan ini, semakin diperparah dengan banyaknya infrastruktur yang rusak akibat dari perang pra kemerdekaan. Pemerintah melaksanakan pembangunan melalui tahapan penataan ekonomi pasca kemerdekaan dan memperkuat pilar ekonomi. Kebijakan yang diterapkan, berdampak pada tercapainya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen pada tahun 1961, tetapi akibat semakin meningkatnya biaya politik yang dikeluarkan pada tahun 1963, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara signifikan hingga menjadi - 2,24 persen Pada tahun 1964.

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pada Era Reformasi membawa perubahan yang cukup besar pada bidang politik dan ekonomi di Indonesia (Firas, 2016). Adapun salah satu dampak positifnya yaitu semakin besar kesempatan masyarakat untuk turut serta menjadi pelaku usaha. Hal ini, membawa arti yang luar biasa bagi pemerintah, swasta dan masyarakat, ketika menghadapi krisis ekonomi, secara bersama-sama mereka dapat bersinergi untuk menanggulangi terjadinya keterpurukan ekonomi nasional. Presiden B. J. Habibie, pada 1998- 1999 pertama kali menjadi pemimpin Indonesia di era reformasi (Alfiyah, 2021). kemudian Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999-2001 yang terpilih menjadi pemimpin pemerintahan di Indonesia (Aprianto, 2016). Pada tahun 2001-2004, Pemerintahan dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. (Wijaya &

Permatasari, 2018) Namun, pada 2004- 2014 kepala pemerintahannya digantikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (Jalal, 2021) Kemudian, pada 2014-2024 kepala pemerintahan digantikan oleh Presiden Joko Widodo (The Habibie Centre, 2019).

Pemerintahan di era B. J. Habibie dikenal sebagai masa rezim transisi, karena pada masanya merupakan momen terjadinya perubahan dari era Orde Baru ke Orde Reformasi. Pemerintah melakukan restrukturisasi sektor perbankan dengan menutup bank-bank yang tidak solven dan melakukan rekapitalisasi pada bank-bank yang masih beroperasi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi intermediasi perbankan. Indonesia berkomitmen pada program pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF), yang mencakup reformasi struktural dan pengurangan subsidi, termasuk subsidi energi dan pangan. Perubahan ini, membawakan hasil berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 menjadi sebesar 0,79 persen. Kondisi ini sekaligus dapat memperkuat nilai kurs rupiah, sehingga roda perekonomian dapat bergerak kembali. Semuanya tidak terlepas dari akibat diterapkannya kebijakan independensi terhadap Bank Indonesia .

Presiden Abdurrahman Wahid, melanjutkan kebijakan Pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi pada tahun 1998. Pemerintahannya, juga menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengatur urusan mereka sendiri. Selama pemerintahannya, Abdurrahman Wahid menjalankan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif (Dzaki, 2024). Kebijakan tersebut, berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2000 menjadi sebesar 4,92 persen. Namun, pada 2001 pertumbuhan ekonomi kembali menurun menjadi sebesar 3,64 persen.

Pemerintahan di era Megawati Soekarnoputri, telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Megawati fokus pada pemulihan stabilitas makroekonomi dengan mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan iklim yang menguntungkan bagi investasi. Pada tahun 2002, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5 persen dan pada 2003 meningkat lagi menjadi sebesar 4,78 persen, kemudian di akhir masa pemerintahannya meningkat lagi menjadi sebesar 5,03 persen. Pemerintahan ini, juga telah menurunkan kemiskinan, dari sebesar 18,4 persen pada 2001, menjadi sebesar 18,2 persen pada 2002, kemudian pada 2003 menjadi sebesar 17,4 persen, dan akhirnya pada 2004 menjadi sebesar 16,7 persen. Keberhasilan ini, tidak terlepas dari kebijakan yang dilakukannya, terutama dengan menjaga kestabilan sektor perbankan

dan dilakukan penerbitan obligasi oleh pemerintah. Kebijakan tersebut, membuat bangsa Indonesia semakin mandiri.

Melalui reformasi ini, IMF berusaha untuk melakukan pengaturan kembali sebagian besar segmen perekonomian Indonesia dan untuk meningkatkan tata kelola sumber daya keuangan negara. Setelah pemerintahan Soeharto berakhir, para penggantinya mulai dari B.J. Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati Soekarnoputri (2001- 2004), dan terutama Susilo Bambang Yudhoyono (2004- 2014) telah mengambil langkah- langkah untuk memperbaiki manajemen dan tata kelola sumber daya keuangan publik. Tiga pilar penting dalam reformasi keuangan selama periode reformasi yang telah dilakukan adalah penciptaan Rekening Kas Umum Negara (RKUN), penguatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang efektif dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PTPK atau Pengadilan Tipikor).

Kebijakan Ekonomi Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Ekonomi menjadi agenda utama pemerintahan SBY dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan Presiden Republik Indonesia keenam. Selama masa pemerintahannya, perekonomian Indonesia mengalami peningkatan namun kesejahteraan rakyat mengalami penurunan. Kebijakan ekonomi yang diambil SBY seolah-olah tidak memihak kepada rakyat seperti kebijakan menaikkan harga BBM.

Pada bulan-bulan pertama pemerintahan SBY, rakyat Indonesia, pelaku usaha di luar negeri dan didalam negeri serta lembaga-lembaga dunia seperti IMF, bank Dunia dan ADB sempat optimis bahwa kinerja ekonomi Indonesia 5 tahun kedepan akan jauh lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan pemerintahan sebelumnya sejak Soekarno lengser. Bahkan, kabinet SBY dan lembaga-lembaga dunia tersebut menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005 akan berkisar sedikit diatas 6%. Target ini dilandasi asumsi bahwa kondisi politik Indonesia akan terus membaik dan faktor-faktor eksternal yang kondusif (tidak memperhitungkan dengan adanya gejolak harga minyak dipasar dunia), termasuk pertumbuhan ekonomi dan motor-motor utama pergerakan ekonomi dunia seperti AS, Jepang, EU(Uni Eropa), dan Cina akan meningkat.

Pada pertengahan kedua tahun 2005 ekonomi Indonesia diguncang oleh dua peristiwa yang tak terduga sama sekali, yaitu naiknya harga BBM di pasar Internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah termasuk dolar As. Dua hal ini membuat realisasi pertumbuhan PDB tahun 2005 lebih rendah dari target tersebut. Kenaikan harga BBM di

pasar internasional (45 dolar AS per barel awal tahun 2005 menjadi 70 dolar AS per barel), pada awal Agustus tahun 2005 sangat tidak menguntungkan Indonesia, tidak seperti masa oil bbm pertama pada tahun 1973 dan kedua awal dekade 80-an. Walaupun Indonesia salah satu anggota dari organisasi negara-negara produsen minyak (OPEC), Indonesia juga impor BBM dalam jumlah yang semakin besar dalam beberapa tahun belakang. Akibatnya, Indonesia bukan hanya menjadi net oli importer, tetapi juga sebagai negara pengimpor BBM terbesar di Asia, jauh melebihi impor BBM Jepang yang bukan penghasil minyak. Tahun 2010 impor BBM Indonesia diprediksi akan mencapai sekitar 60 persen dan tahun 2015 akan menjadi sekitar 70 persen dari kebutuhan BBM dalam negeri (Kurtubi 2005).

Tingginya impor BBM Indonesia disebabkan oleh konsumen minyak dalam negeri yang meningkat pesat setiap tahun mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita, dan disisi lain kapasitas kilang minyak di dalam negeri masih sangat terbatas menurut Kurtubi (2005), saat ini (September 2005), kekurangan kapasitas Indonesia sekitar 400.000 barrel per hari. Kenaikan harga minyak ini menimbulkan tekanan yang sangat berat terhadap keuangan pemerintah (APBN), akibatnya, pemerintah terpaksa mengeluarkan status kebijakan yang tidak populis, yaitu mengurangi subsidi BBM, yang membuat harga BBM di pasar dalam negeri meningkat tajam. Kenaikan harga BBM yang besar untuk industri terjadi sejak 1 Juli 2005. Harga solar untuk industri Rp 2.200 per liter menjadi 4.700 per liter (naik 115 persen). Tanggal 1 Agustus 2005, kenaikan harga minyak tanah untuk industri dari 2.200 per liter menjadi 5.490 per liter (naik 93 persen).

Menurunnya kegiatan ekonomi/produksi menyebabkan berkurangnya pendapatan usaha. selanjutnya juga akan memperbesar devisa APBN karna pendapatan pajak berkurang. Harga BBM yang tinggi akan mendorong inflasi di dalam negeri. Semua akan berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja atau akan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Kenaikan pengangguran dan kemiskinan juga menambah devisa APBN karna menurunnya pendapatan pemerintah dari pajak pendapatan, sementara di sisi lain, pengeluaran pemerintah terpaksa ditambah untuk membantu orang miskin.

Kombinasi antara kenaikan BBM dan melemahnya nilai rupiah akan berdampak pada peningkatan inflasi. Menurut data perkiraan dari BI (Agustus 2005), inflasi dari indeks harga konsumen (IHK) cenderung berada pada tingkat yang cukup tinggi yaitu 7,42%. Sementara itu, menurut citogroup, pada tahun 2005 inflasi di Indonesia berada pada tingkat 6,2 persen, dan merupakan angka tertinggi diantara banyak negara di Asia. Selain itu, pada periode

2008- 2009 terjadi krisis ekonomi global yang berawal dari krisis keuangan di AS dan merembet ke negara maju lainnya seperti Jepang dan negara negara di zona Euro (EU), yang pada akhirnya mengakibatkan suatu resesi ekonomi dunia. Sedangkan krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008-2009 tersebut hanya membuat laju pertumbuhan ekonomi nasional lebih rendah dari yang diharapkan namun tetap positif. Banyak faktor yang membuat perekonomian Indonesia lebih baik dalam menghadapi krisis 2008-2009 tersebut dibandingkan pada tahun 1997-1998, diantaranya adalah kondisi perbankan nasional yang jauh lebih baik dari pada masa orde baru dan keberhasilan pemerintah dalam memproses krisis tersebut dengan tetap menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah dan menambah pengeluaran pemerintah yang dikenal dengan sebutan stimulus fiskal.

Kebijakan Ekonomi Masa Pemerintahan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerapkan berbagai strategi dan kebijakan yang komprehensif untuk mencapai visi dan misinya dalam membangun ekonomi Indonesia yang maju, adil, dan berkelanjutan. Strategi dan kebijakan tersebut mencakup sejumlah bidang kunci yang menjadi fokus utama pemerintah dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, meningkatkan daya saing, serta mewujudkan kemandirian ekonomi. Salah satu langkah kunci yang diambil oleh pemerintah Jokowi adalah reformasi regulasi. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk mempermudah investasi dan berusaha di Indonesia. Jokowi memahami bahwa regulasi yang rumit dan birokrasi yang berbelit- belit dapat menjadi hambatan besar bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi (Manurung, Putri, & Nasution, 2024). Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan revisi dan penyederhanaan berbagai peraturan dan prosedur yang menghambat bisnis dan investasi.

Pemerintah Jokowi juga menyadari pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, berbagai program telah diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Inisiatif-inisiatif seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, program pelatihan kejuruan, serta peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang teknologi dan inovasi telah diimplementasikan untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi tuntutan ekonomi global yang semakin kompleks.

Pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden ke-7, Presiden Joko Widodo memang mengalami akselerasi yang signifikan, terutama dalam pembangunan jalan tol,

bandara, LRT, dan proyek kereta cepat. Meskipun hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga menyebabkan dampak negatif seperti pengurangan lahan pertanian, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Terlebih lagi, beberapa proyek infrastruktur dibiayai oleh utang dari negara-negara asing, meningkatkan ketergantungan Indonesia pada mereka. Ini menimbulkan dilema antara pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan, menghadirkan tantangan kompleks dalam pembangunan negara.

Pembangunan infrastruktur dapat memiliki dampak sosial yang signifikan terutama terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan. pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang dengan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi regional (Triadi, Angelo Pangaribuan, Triamorita Tampubolon, & Wicaksana Naibaho, 2024). Namun, proyek-proyek infrastruktur yang besar juga membutuhkan investasi yang besar dari pemerintah, yang dapat mengakibatkan peningkatan utang negara jika tidak dikelola dengan baik.

Jokowi juga telah aktif dalam mempromosikan investasi asing dan ekspor sebagai salah satu strategi untuk memperluas pasar dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah meluncurkan program-program insentif untuk menarik investasi asing langsung (FDI) ke sektor-sektor strategis, serta melakukan diplomasi ekonomi untuk membuka akses pasar baru bagi produk-produk Indonesia di tingkat internasional. Pemerintah Jokowi juga mengakui peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan untuk mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM, termasuk akses terhadap modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pemasaran dan promosi produk UMKM di pasar domestik maupun internasional.

IV. KESIMPULAN

Perubahan paradigma perekonomian Indonesia dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan, kondisi politik, serta tantangan internal dan eksternal yang dihadapi bangsa. Pada masa Orde Lama, dominasi kontrol negara dan kebijakan nasionalisasi yang kurang efektif menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat, inflasi tinggi, dan defisit anggaran yang membesar, sehingga stabilitas ekonomi sulit tercapai.

Berbeda dengan itu, masa Orde Baru ditandai dengan orientasi ekonomi yang lebih terbuka dan pro-pasar, didukung oleh masuknya investasi asing dan program pembangunan

jangka panjang (Repelita). Kebijakan ini berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pengurangan kemiskinan, namun juga menimbulkan ketimpangan sosial dan ketergantungan pada modal asing, serta praktik korupsi yang meluas.

Memasuki era Reformasi, paradigma ekonomi bergeser ke arah desentralisasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Pemerintah menekankan pentingnya pemerataan, perlindungan sosial, dan penguatan sektor usaha kecil dan menengah, dengan harapan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, evolusi kebijakan ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi sangat bergantung pada stabilitas politik, kemauan politik yang kuat, serta kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan tantangan zaman. Pembelajaran dari setiap periode menjadi landasan penting bagi perumusan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan adil di masa depan.

V. REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 47.
- Bintoro, B. (2020). Kebijakan Politik Ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhono, 21(1), 19.
- Christian, D. (2017). *Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016*, (August).
- Dahlan, A., & Wildan, M. (2022). Analisis Ekonomi Politik Terhadap Kebijakan
- Dzaki, M. . et al. (2024). Kondisi Sosial Ekonomi Indonesia Pada Masa Reformasi. *Cendekia Pendidikan*, 4(4), 50–54.
- Elza Rahmawati, Eli Apud Saepudin, Dina Dwi Apriani, Aulia Fitriani, & Lia Rosiana. (2024). Konsep Ekonomi Kebijakan dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Journal of Politica Governo*, 1(2), 30–37.
- Fahrika, A. I., & Zulkifli. (n.d.). PEREKONOMIAN INDONESIA.
- Faisyal, R., & Wulandari, C. (2015). Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Transnasional*, 7(1), 1914–1928.

- Firdaus, D. W., Megantara, T., & Siliwangi. (2022). HUBUNGAN BANK DUNIA DENGAN KEGAGALAN EKONOMI DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU, 9(2), 181–188.
- Glassburner, B. (Ed.). (2007). *The economy of Indonesia: selected readings*. Equinox Publishing.
- Handayani, R. D., & Kesuma, W. (2021). Capital Market Investors Reaction To Announcement of the Economic Policy Package Jokowi – Jusuf Kalla. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.
- Jalal, A. (2021). SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN, 6, 166–184.
- Kennedy, P. S. J. (2020). Permasalahan Jangka Pendek dan Kebijakan Pemerintah Indonesia. *Modul Ekonomi Pembangunan*, 1–27.
- Lindblad, J. T. (2008). *Bridges to new business: The economic decolonization of Indonesia* (Vol. 245). Brill.
- Maknun, L. (2024). Dinamika Kebijakan Moneter di Indonesia: Sejarah, Transformasi, dan Respons terhadap Krisis Ekonomi. *Dinamika Kebijakan Moneter di Indonesia: Sejarah, Transformasi, dan Respons terhadap Krisis Ekonomi*.
- Manurung, A. S., Putri, D. A., & Nasution, A. R. (2024). Peran Pemimpin terhadap Perubahan Sistem Ekonomi Menuju Indonesia Maju. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 37.
- Muhlizi, A. F. (2017). Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 349.
- Noventari, W. (1998). KUASA DIBALIK SENYUM SANG JENDRAL (Analisis Gaya Kepemimpinan Dan Bagaimana Soeharto Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun) *Widya Noventari* 4, 24(2), 33–40.
- Komunikasi, Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 1 No., 151–159.
- Paramita, R. (2019). Dinamika Kebijakan Keterlibatan Indonesia Dalam Kerjasama Selatan-Selatan (Kss) Periode 2004-2018. *Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 38–56.
- Parhusip, B., & Siallagan, W. A. (2021). Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1: Reviu Literatur. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 3(1), 85–101.
- Pemerintahan Jokowi Pada Sektor Kawasan Industri Halal (KIH) dan Perbankan Syariah. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 105–122.

- Rahmawati, R. (2022). REPELITA : SEJARAH PEMBANGUNAN NASIONAL DI ERA,IX(2), 36–42.
- Saleh, M. H. (2005). Kebijakan Pemerintah SBY-JK Tentang Kenaikan Harga BBM 1 Oktober 2005. *Sosial-Politika*, 6(12), 43–58.
- Setia, N. (2023). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia Era Soeharto 1966-1980. *Journal of Indonesian History*, 11(1), 44–54.
- Shaleha, P; Selviana, A., & Muharman. (2024). Sejarah Perkembangan Kebijakan Ekonomi Pada Masa Orde Baru dan Pengaruh Krisis Moneter terhadap Perekonomian Indonesia, 41–46.
- Sodiq, A. (2017). Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG): Studi Kasus pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung. *The International Journal Of Applied Business Tijab*, 1(November), 32–38.
- Suhartono, S., Arsyad, N., & Amelia, F. (2020). Peran kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Studi pada pemerintah desa tonasa dan desa mamampang, tombolo pao). *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 3(3), 336–353.
- Sundhaussen, U. (1982). *The road to power: Indonesian military politics, 1945-1967. (No Title).*
- Triadi, I., Angelo Pangaribuan, K., Triamorita Tampubolon, I., & Wicaksana Naibaho, A. (2024). Analisis Perbedaan Era Reformasi Pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yidhoyono Dengan Presiden Joko Widodo (Analysis Of The Differences In The Reform Era During The Government Of President Susilo Bambang Yidhoyono And President Joko Wi. *RETORIKA Jurnal*.
- Wijaya, J. H., & Permatasari, I. A. (2018). Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ . Habibie dan Megawati di Indonesia Achievement of the President ' s Governance Period BJ . *Habibie and Megawati in Indonesia*, 12.
- Wilardjo, S. B. (2013). Sukarno: Suatu Tinjauan Perspektif Sejarah Dan Perilaku Organisasi Setia, 9(1), 1–12.
- Yudhoyono, S. B., Di, S., Yudhoyono, S. B., Kalla, J., Bersatu, K. I., Yudhoyono, S. B., ... Minyak, B. B. (2005). Kebijakan Ekonomi Sby-Kalla, 37–41.
- Zuchroh, I. (2024). Prinsip Keadilan Ekonomi Dalam Prespektif Islam Dan Implementasinya. *Jurnal Education and Development*, 12(2), 135–139.